

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI MELALUI PENDEKATAN ICZM (*INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT*)

Mariana Kristiyanti

Jurusan KPN, STIMART “AMNI” Semarang

Jl. Soekarno-Hatta No. 180 Semarang 50199

Telp. (024) 6710486, Fax. (024) 6714745

E-mail : mkristiyanti@yahoo.com

ABSTRAK

Wilayah pantai merupakan suatu bagian yang kaya akan potensi sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai wilayah wisata bahari. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, sejak dahulu juga telah menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat disekitar pesisir pantai mengalami keterpurukan. Masyarakat belum dapat mengelola sumber daya pantai secara optimal. Sentuhan pengetahuan akan pemanfaatan pengembangan Sumber daya di wilayah pesisir pantai sangat minim sekali. Masyarakat tidak mengenal cara lain yang lebih efektif dan inovatif untuk mengelola sumber daya pantai yang mereka hasilkan. Dengan melihat permasalahan tersebut diatas, maka dibutuhkan model baru untuk pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) adalah pendekatan yang akan digunakan dalam mengoptimalisasi pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pantai. Diharapkan dengan pendekatan ICZM, tidak hanya pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir pantai saja yang akan membaik, tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proposional oleh segenap pihak yang terlibat (*stakeholders*), dan dapat memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir yang baik sehingga dapat melestarikan wilayah pantai. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan serta observasi secara langsung.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir Pantai, Pendekatan ICZM

1. PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir beserta sumberdaya alamnya, memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Dengan jumlah pulau sekitar 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia dikenal sebagai negara *mega-biodiversity* dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan. Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata, dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir pantai semakin meningkat.

Sebagai negara Kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 65% wilayah laut, Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi yang sangat besar. Potensi tersebut berupa sumberdaya alami seperti terumbu karang, hutan mangrove, pantai berpasir, ataupun sumberdaya buatan seperti tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri dan perhubungan. Meskipun demikian kontribusi sektor kelautan masih relatif kecil bagi perekonomian nasional. Wilayah pesisir dan lautan di Indonesia, memiliki sumberdaya alam melimpah yang sekaligus juga menyimpan serbagai permasalahan yang perlu ditangani secara terintegrasi dan terpadu.

Wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Nilai dan arti penting pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua aspek, *pertama*, secara sosial ekonomi wilayah pesisir dan laut memiliki arti penting karena sekitar 120 juta (50%) penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2% per tahun), sebagian besar kota (kota propinsi dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir. *Kedua*, secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (sekitar 81.000 km), sekitar 75% dari wilayahnya merupakan wilayah perairan (Dep. Kelautan RI, 2002) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun demikian hampir sudah menjadi pertanyaan umum tentang masyarakat nelayan yang masih dalam taraf pendapatan yang rendah.

752

Hasil laut adalah sumber utama penghidupan masyarakat pesisir yang hidup dari hasil laut atau bahkan dapat dikatakan bahwa basis perekonomian masyarakat pesisir adalah sektor perikanan. Tingginya unsur ketidakpastian dalam melaut, khususnya bagi masyarakat pesisir, telah menjadi persepsi umum yang berkembang menyangkut kebutuhan hidup keluarga nelayan dan umumnya masyarakat pesisir. Sejarah kemiskinan keluarga yang mengantungkan hidup dari apa yang diberikan laut kemudian sering menjadi gambaran tekanan situasi sektor ini.

Di Kemukakan oleh Fadel Muhammad (2009) bahwa “Saat ini masih banyak nelayan hidup dibawah garis kemiskinan, Kita upayakan dengan adanya regulasi mengenai nelayan kita berharap bisa meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.” Pernyataan ini sesuai dengan kondisi nelayan di Pesisir pantai, yang sampai saat ini masih bergelut dengan kemiskinan. Penghasilan yang didapat oleh buruh nelayan dan nelayan kecil tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain budaya konsumtif, kecilnya pendapatan telah menyebabkan mereka terjatuh lingkaran hutang. Pengeluaran terbesar mereka digunakan untuk melunasi hutang, belanja kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya sekolah. Penghasilan dari melaut langsung habis, sehingga mereka berhutang lagi dan sulit keluar dari kemiskinan. Jika sudah begitu, kelompok perempuanlah yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan berjualan, mencari hutang, dan menggadaikan barang yang dimilikinya.

Tekanan situasi yang dialami masyarakat pesisir tersebut diatas memungkinkan penggunaan segala cara dalam pemanfaatan sumberdaya laut, termasuk cara- cara yang tidak ramah lingkungan. Pernyataan tersebut bukanlah sebuah issue belaka, tetapi sebuah realitas yang terjadi dan berkembang saat ini di hampir semua lokasi di wilayah pesisir di Indonesia.

Penduduk di wilayah pesisir pantai memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah, dimana pada musim barat, sebagian nelayan tidak melaut dan sebagian besar dari mereka hanya mengantungkan hidupnya pada ikan di laut. Dengan melihat hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai salah satu cara yang harus diprioritaskan.

Dengan dikembangkannya model baru untuk mengoptimalisasikan pemberdayaan masyarakat pesisir, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) adalah pendekatan yang akan digunakan dalam mengoptimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. Diharapkan dengan pendekatan ICZM, tidak hanya pertumbuhan ekonomi masyarakat saja yang akan membaik, tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proposional oleh masyarakat di pesisir pantai.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Masyarakat Pesisir Pantai

Berdasarkan kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Dilihat dari garis pantai, maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu: batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Akan tetapi, penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan. Dengan kata lain batas wilayah pesisir berbeda dari satu Negara ke Negara lain karena setiap Negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan system pemerintahan tersendiri.

Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, kearah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan kearah laut meliputi daerah paparan benua. Dalam hasil rapat kerja nasional tahun 1994, telah di tetapkan bahwa batas kearah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Sedangkan batas kearah darat adalah mencakup batas administrative seluruh desa pantai yang termasuk ke dalam wilayah Pesisir.

Sumber daya di wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih dan tidak dapat pulih, sumber daya alam yang dapat pulih seperti : perikanan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang, sedangkan sumber daya tak dapat pulih antara lain : minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya.

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan usaha sektor lain.

2.2 Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal ini keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sector atau instansi pemerintah. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mesyarakatkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan. Mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri dari tiga tahap utama: perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi maka keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.

2.3 ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*)

Wilayah pesisir sekarang ini berada di bawah tekanan yang meningkat dari erosi, polusi, perubahan iklim, urbanisasi, dan pariwisata. Tekanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada seluruh ekosistem yang ada, selain satwa liar yang hidup disana tetapi juga bagi perekonomian dan kesejahteraan manusia. Untuk itu pengelolaan pesisir dianggap menjadi hal yang sangat krusial sehingga sangat diperlukan pengelolaan secara terpadu dan menyeluruh. Sebuah konsep yang ditawarkan dalam pengelolaan pesisir adalah ICZM.

ICZM (*Intregated Coastel Zone Management*) adalah suatu pendekatan yang menyeluruh yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir. ICZM merupakan suatu pedoman untuk mengelola kawasan pesisir secara terpadu. Metodologi dari ICZM ini telah dikembangkan secara hati-hati sejak beberapa dekade yang lalu. Konsep ini membutuhkan kemampuan kelembagaan untuk menangani masalah-masalah intersektoral seperti lintas disiplin ilmu, kewenangan-kewenangan dari lembaga pemerintah, dan batas-batas kelembagaan (Hinrichsen, 1998).

Pesisir sebagai zona transisi antara lingkungan darat dan laut, wilayah pesisir dipengaruhi oleh perubahan dan tekanan dari darat dan laut. Pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dapat tercapai dengan menggunakan pendekatan dan penelitian terpadu dengan ekosistem, dengan melibatkan masyarakat global maupun regional dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi. Adapun tujuan dari pembentukan ICZM sendiri antara lain :

1. Mengatasi permasalahan pembangunan pesisir dan lautan yang berlangsung saat ini dan masa mendatang.
2. Memberdayakan masyarakat pesisir (para pengguna wilayah pesisir dan lautan atau biasa disebut stakeholder) agar dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara berkesinambungan.

Pada dasarnya ICZM adalah konsep pengelolaan pesisir yang mengikut sertakan peran masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat akan turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kawasan pesisir yang menjadi daerah huniannya. ICZM dan sustainable development menjadi satu kolaborasi yang sangat baik apabila dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Dilihat dari konsep dimensinya, ICZM dapat dipandang dari beberapa segi, antara lain:

1. Dimensi ekologis
 - a) Mengelola segala kegiatan pembangunan yang terdapat pada suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsional yang ada.
 - b) Misalnya pada wilayah pesisir yang diggunakan sebagai area pembuangan limbah harus mendapatkan jaminan bahwa total pembuangan limbah tidak melebihi batas asimilasi yang ada.
2. Dimensi sosial- ekonomi
Pola dan laju pembangunan harus dikelola sedemikian rupa sehingga total demand terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplay yang ada.
3. Dimensi sosial – politik
Adanya permasalahan lingkungan maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratis dan transparan.

Adapun keunggulan dari pengadaan ICZM adalah :

1. Memberi kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk membangun sumber daya secara berkesinambungan.

2. Memungkinkan untuk memasukkan pertimbangan tentang kebutuhan serta aspirasi masyarakat terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang ke dalam perencanaan pembangunan dengan adanya konsep partisipatif mendorong pembangunan sumber daya serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut.
3. Membantu pemerintah daerah maupun pusat dengan suatu proses yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Biaya yang dikeluarkan pada pendekatan ICZM lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan menggunakan pendekatan sektoral.

Dari beberapa keunggulan ICZM tersebut dapat kita lihat bahwa sebenarnya ICZM adalah sebuah konsep yang saat ini dianggap paling ideal untuk diterapkan di daerah pesisir. Namun ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ICZM. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Dalam pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu (ICZM) perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain (Kay, 1999) :

- 1) Peran dari prinsip pembangunan berkelanjutan dari para perencana dan pemegang kebijakan merupakan tantangan untuk dapat mentransfer dalam pengelolaan
- 2) Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir, merupakan hal yang sangat berkaitan erat.
- 3) Perencanaan dan pengelolaan yang mengacu, pada komitmen dari berbagai pihak menjadi penting, sehingga muncul berbagai bentuk pengelolaan seperti *community based, collaborative and co community based*. Bentuk ini merupakan antisipasi dari konflik kepentingan bagi multipihak.
- 4) Pengelolaan wilayah pesisir merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Tanggungjawab dan pengelolaan yang berkelanjutan meliputi usaha internasional hingga pada tataran lokal, bersama dengan pengguna wilayah pesisir, penduduk, perusahaan, Perusahaan swasta, kelompok swasta, kelompok-kelompok advokasi, dan pemerintah. Kemitraan ini perlu dijalin untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan bersama-sama.
- 5) Pengelolaan wilayah pesisir yang berhasil adalah yang berbasis pada tradisi (*local knowledge*), terkait dengan sumberdaya alam dan pengelolaannya.
- 6) Beberapa teknik perencanaan perlu selalu dikembangkan secara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan wilayah pesisir.
- 7) Strategi perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dapat diramu dengan berbagai multipihak yang terkait, merujuk kebijakan, dan dalam skala yang berbeda dan terkait. Sehingga ada orientasi yang terintegrasi.
- 8) Melakukan evaluasi pada keberhasilan. Kebijakan dan program wilayah pesisir harus selalu dievaluasi dan dimonitor untuk memberikan ukuran keberhasilannya.

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir yang sangat luas. Dalam melakukan pengelolaan pesisirnya, Indonesia mengacu pada Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, pada pedoman ini wilayah pesisir didefinisikan sebagai, “Wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling memengaruhi di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota”.

Berdasarkan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tahun 2004, pengertian wilayah pesisir ialah : “Satu kesatuan wilayah antara daratan dan lautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan yang di dalamnya termasuk ekosistem pulau kecil serta perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil”.

3. METODE PENULISAN

Pada Penulisan ini, metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, diharapkan dengan pendekatan ini dapat memperkuat dan mempertajam pembahasan kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif dipilih agar dapat memberikan gambaran tentang daerah potensi mata pencarian alternatif bagi masyarakat pesisir pantai. Sedangkan studi pustaka dan studi komparasi digunakan untuk mencari data dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pantai.

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap maka digunakanlah metode observasi, yaitu mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan pemberdayaan wilayah pesisir pantai. Menurut Bimo Walgito (2010) : “ Observasi adalah penyelidikan (studi) yang secara sistematis dan disengaja

melalui pengamatan ke arah kejadian-kejadian yang spontan pada saat kejadian itu terjadi. Oleh karena itu observasi adalah merupakan pengamatan, maka observasi menggunakan alat indera sebagai alat yang utama”.

4. PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

Nelayan adalah suatu fenomena sosial yang sampai saat ini masih merupakan tema yang sangat menarik untuk didiskusikan. Membicarakan nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marjinal, miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun politik.

Kemiskinan yang selalu menjadi “*trade mark*” bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang.

Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain *affirmative actions*, perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (*patron*) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (*indigenous*) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya. Kepastian dan kekakuan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut

dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

4.1 Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Pesisir

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Berbagai proyek, program dan kegiatan telah dilakukan. Namun hasil yang diperoleh dapat dikatakan belum memperoleh hasil yang maksimal. Pertumbuhan penduduk yang menempati kawasan pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya.

Program-program pemerintah tersebut antara lain : motorisasi armada nelayan skala kecil, penerapan sistem rantai dingin (*cold chain system*), pembangunan prasarana perikanan, dan sebagainya. Program lain yang berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup adalah pembuatan karang buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi kawasan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destruktif adalah program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan.

Demikian juga pola usaha yang secara marak dikembangkan di hampir seluruh Indonesia adalah perikanan inti rakyat, suatu sistem usaha dimana nelayan sebagai plasma bermitra dengan perusahaan sebagai inti. Namun demikian bisa juga dikatakan bahwa upaya-upaya dari sisi kelembagaan ini belum juga memberikan hasil yang jelas menguntungkan nelayan. Meskipun banyak kelembagaan nelayan terbentuk, namun hanya sedikit bisa bertahan. Dengan bergantinya waktu, banyak juga lembaga-lembaga nelayan yang perlahan-lahan mati dan tidak berfungsi. Demikian juga banyak kemitraan nelayan dan perusahaan besar tidak berlanjut karena ketidakadilan dalam pembagian hasil, resiko dan biaya. Malahan sebaliknya, pola hubungan kemitraan antara nelayan dan swasta menjadi sesuatu yang dinilai negatif oleh nelayan dan konsep yang bagus ini ditolak oleh nelayan.

4.2 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Eko, 2002).

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)).

Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

4.3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam kaitan pemberdayaan masyarakat nelayan beberapa faktor harus diperhatikan, misalnya kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat nelayan. Untuk alternatif yang diberikan adalah pemberdayaan masyarakat nelayan dengan kerangka pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas (*Community-Based Fishing System Management*). Program-program pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Proses pembangunan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pendekatan pembangunan yang selama ini menggunakan *top-down approach* sudah bergeser menjadi *bottom-up approach*. Dalam pemberdayaan masyarakat, pendekatan bottom-up ini menjadi titik tolak. Masyarakat dilibatkan sejak dini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi program yang akan dilaksanakan.

4.4 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, terdapat lima pendekatan digunakan (Nikijuluw, 2001). Pendekatan inilah yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan koperasi telah banyak yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelima pendekatan tersebut adalah:

- (1) Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga,
- (2) Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*),
- (3) Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna,
- (4) Mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta
- (5) Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Uraian singkat tentang kelima program ini adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga. Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber-daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.
2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*). Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya collateral, insurance dan equity.
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna. Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar. Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya.
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan suatu aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu.

4.5 Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*)

Sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, kawasan pesisir di Indonesia berkembang menjadi kawasan dengan pertumbuhan yang cukup pesat, mengingat kawasan pesisir dapat menyediakan ruang dengan aksesibilitas tinggi dan relatif murah dibandingkan dengan ruang daratan. Oleh karena itu, pesisir menjadi tempat tujuan pergerakan penduduk. Hampir 60% jumlah penduduk di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makasar menyebar ke daerah pesisir (Adibroto, 1999 : 125 ; Dahuri, et al, 2001 ; Burbridge, 1988). Pada umumnya kota-kota pada kawasan pesisir di Indonesia memiliki berbagai peran, antara lain : potensi penyedia sumber daya alam, kawasan industri dan pelabuhan, perikanan, pariwisata dan permukiman. Selain itu juga, berkaitan dengan kemudahan akses dan hubungan antar pulau dan antar wilayah itulah sebagian besar kota-kota di Indonesia berada di kawasan pesisir. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan kawasan pesisir merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang pembangunan di Indonesia.

ICZM merupakan suatu pendekatan yang komprehensif yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir, berupa kebijakan yang terdiri dari kerangka kelembagaan dan kewenangan hukum yang diperlukan dalam pembangunan dan perencanaan pengelolaan untuk kawasan pesisir yang terpadu dengan tujuan lingkungan hidup dan melibatkan seluruh sektor yang terkait (Post and Lundin, 1996). Tujuan dari ICZM adalah untuk memaksimalkan potensi

keuntungan yang diperoleh dari kawasan pesisir dan meminimalkan dampak negatif dalam pengelolaan kawasan pesisir, baik pada sumber daya alam maupun terhadap lingkungan hidup.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) yang dikenal istilah *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) pertama kali dikemukakan pada Konferensi Pesisir Dunia (*World Conference of Coast*) yang digelar pada tahun 1993 di Belanda. Pada forum tersebut, PWPT diartikan sebagai proses paling tepat menyangkut masalah pengelolaan pesisir, baik untuk kepentingan saat ini maupun jangka panjang, termasuk di dalamnya akibat kerugian habitat, degradasi kualitas air akibat pencemaran, perubahan siklus hidrologi, berkurangnya sumber daya pesisir, kenaikan muka air laut, serta dampak akibat perubahan iklim dunia (Subandono, et al, 2009). Lebih jauh, Subandono, et al, (2009) juga menyatakan bahwa konsep PWPT menyediakan suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan yang tepat dalam menaklukkan berbagai kendala dan permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir, seperti adanya pengaturan institusi yang terpecah-pecah, birokrasi yang berorientasi pada satu sektor, konflik kepentingan, kurangnya prioritas, kepastian hukum, minimnya pengetahuan kedudukan wilayah dan faktor sosial lainnya, serta kurangnya informasi dan sumberdaya.

4.6 Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam ICZM

Pemberdayaan masyarakat secara khusus dan eksistensi masyarakat secara umum perlu diinternalisasikan dalam pengembangan, perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. Faktor kemitraan antara seluruh *stakeholder* dalam proses perencanaan hingga evaluasi harus ditumbuhkembangkan. Komponen-komponen yang terlibat dalam kemitraan pengelolaan pesisir, antara lain adalah masyarakat lokal, pemerintah (pusat dan daerah), LSM, media massa, swasta, donor, organisasi internasional, masyarakat ilmuwan. Beberapa aspek yang berkenaan dengan masyarakat adalah kekuatan penentu (*driving forces*) status dan eksistensi suatu kawasan pesisir. Setidaknya ada 4 (empat) keuntungan yang didapatkan dalam pengelolaan berbasis masyarakat :

- (1) Masyarakat ikut mengontrol sumber daya di sekitar mereka,
- (2) Dukungan yang luas dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada,
- (3) Ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut,
- (4) Pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitarnya.

5. KESIMPULAN

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Kemiskinan yang selalu menjadi "*trade mark*" bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.

Namun demikian bisa juga dikatakan bahwa upaya-upaya dari sisi kelembagaan ini belum juga memberikan hasil yang jelas menguntungkan nelayan. Malah sebaliknya, pola hubungan kemitraan antara nelayan dan swasta menjadi sesuatu yang dinilai negatif oleh nelayan dan konsep yang bagus ini ditolak oleh nelayan.

ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) merupakan suatu pendekatan yang komprehensif yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir, berupa kebijakan yang terdiri dari kerangka kelembagaan dan kewenangan hukum yang diperlukan dalam pembangunan dan perencanaan pengelolaan untuk kawasan pesisir yang terpadu dengan tujuan lingkungan hidup dan melibatkan seluruh sektor yang terkait. Tujuan dari ICZM adalah untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang diperoleh dari kawasan pesisir dan meminimalkan dampak negatif dalam pengelolaan kawasan pesisir, baik pada sumber daya alam maupun terhadap lingkungan hidup.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan, memiliki beberapa alternatif pendekatan yang biasa digunakan :

- (1) Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga,
- (2) Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*),

- (3) Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna,
- (4) Mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta
- (5) Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibroto, T.A. (1999). *Managing the Indonesia Marine and Coastal Environment : The Role of Monitoring Activities*. Proceeding no. 979 – 8465 – 07 – 5 Workshop on Technology Application on Marine Environmental Monitoring, Forecasting and Information System. Institutional Framework and Project Benefits, 17 November 1999. Jakarta. Indonesia.
- Bimo Walgito. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Burbridge, D.R (Eds). (1998). *Coastal Zone Management is the Strait of Malacca*. Proceedings of Symposium on Environmental Research and Coastal Zone Management is the Strait of Malacca in 1995. Medan. Indonesia.
- Dahuri, R., Rais J., Ginting S.P., Sitepu, M.J. (cet. 2), (2001) : *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* ; PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Indonesia
- Diarto, Hendrarto, B., dan Suryoko, S. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 10 Issue 1 : 1-7 Tahun 2012. Semarang.
- Dirhamsyah. (2006). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terintegrasi di Indonesia*. *Jurnal Oseana*, Vol XXXI Nomor 1 Tahun 2006 : 21-26. Bogor. Sumber : www.oseanografi.lipi.go.id. Diakses pada tanggal 26 September 2013.
- Djunaedi, A., dan Basuki, M.N. (2002). *Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir*. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol 3 Nomor 3, September 2002 : 225-231. Yogyakarta.
- Eko, S. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim pada Desember 2002. Samarinda.
- Fadel, Muhammad. (2009). *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Hinrichsen, D. (1998). *Coastal Waters of the World : Trends, Threats, and Strategies*. Washington, DC: Island Press.
- Kay, R., dan J. Alder. (1999), *Coastal Planning and Management*. E&FN Spon. London.
- Nikijuluw, V.P.H. (2001). *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu*. Makalah dipresentasikan pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Bogor, 29 Oktober 2001
- Salim, A.R., Purnaweni, H., dan Hidayat, W.(2011) *Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Desa Botubarani dan desa Huangobotu)*. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 9 Nomor 1, April 2011 : 39-47. Semarang.
- Subandono, D., Budiman, Agung, F. (2009). *Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Penerbit Buku Ilmiah Populer. Bogor.
- Razali, I. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut*. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Vol 3 Nomor 2, Mei 2004 : 61-68. Medan.
- Utomo, D. (2011). *Analisis Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan di Kawasan Pesisir Kota Tegal*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 9, Issue 2 : 51-55 Tahun 2011. Semarang.
- Post, J.C., and Lundin, C.G. (1996). *Guidelines for Integrated Coastel Zone Management*. Environmentally Sustainable Development Studies and Monograph The World Bank. Washington, D.C.
- Latama, G., et al. (2008). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Sumber : <http://walhijabar.wordpress.com/2008/01/10/pengelolaan-wilayah-pesisir-berbasis-masyarakat-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 September 2013